

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI
LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI
(BALILATFO) PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI**

ABSTRAK

Oleh

Dian Febriana Sari

Dalam sebuah lembaga instansi pemerintahan setiap kegiatan pasti memiliki beberapa faktor penting yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dan itu merupakan para Pegawai Pemerintahan yang telah memiliki perjanjian hubungan kerja dalam periode tertentu, namun dalam hal ini sangat berpengaruh dengan imbalan balas jasa yang akan dibayarkan setiap bulannya. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan dalam menyusun prosedur penggajian pegawai. Prosedur ini diterapkan guna meningkatkan efisiensi pembayaran gaji yang tepat serta menghindari kesalahan dan penyimpangan yang akan terjadi. Dalam penyusunan prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terdiri dari fungsi-fungsi dan dokumen yang terkait dengan prosedur penggajian. Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Balilatfo-Kemendesa-PDT-Trans. Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja adalah melakukan wawancara dan observasi di bagian pihak yang terkait dengan penggajian. Manfaat yang didapatkan dari praktik kerja lapangan adalah mengetahui prosedur penggajian PPNPN yang digunakan oleh Puslitbang Balilatfo Kemendesa-PDT-Trans. berdasarkan prosedur penggajian PPNPN, telah berjalan dengan baik dan ditetapkan serta disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian penyerahan gaji pun langsung dikirim melalui Bank Negara Indonesia sehingga mengurangi terjadinya kesalahan yang akan terjadi.

Kata Kunci : Prosedur, Penggajian, PPNPN

**REVIEW OF PAYROLL PROSEDUR OF GOVERNMENT
EMPLOYEE ON NON CIVIL SERVANT (PPNPN) IN
ENVIRONMENT OF INSTITUTION OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT, EDUCATION AND TRAINING, AND
INFORMATION (BALILATFO) IN THE MINISTRY OF VILLAGE,
DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED AREA, AND
TRANSMIGRATION REPUBLIC OF INDONESIA**

ABSTRACT

By

Dian Febriana Sari

In a government agency, each activity must have several important factors that influence the achievement of a goal and that is the Government Employees who have a work relationship agreement in a certain period, but in this case it is very influential in return for remuneration to be paid every month. Therefore there are several rules in preparing procedures for employee payroll. This procedure is applied to improve the efficiency of proper salary payments and avoid mistakes and deviations that will occur. In the formulation of non-civil servant government employee payroll procedures(PPNPN) There are functions and documents related to payroll procedures. The implementation of the Field Work Practice aims to obtain an overview of the payroll procedure for Non-Civil Servants Government Employees in the Balilatfo-Kemendesa-PDT-Trans environment. Activities carried out during work practice are conducting interviews and observations on the part of the parties related to payroll. The benefits obtained from field work practice are knowing the PPNPN payroll procedure used by the Balilatfo Research Center for Kemendesa-PDT-Trans. Based on the PPNPN payroll procedure, it has been running well and has been determined and approved by the commitment-making officials. Then the delivery of salaries was sent directly through Bank Negara Indonesia so that reduce the occurrence of error that would occur.

Keywords : Procedure, Payroll, PPNPN